

PERAN POLITIK KYAI DI MASYARAKAT (Studi Tentang Bentuk dan Variasi Peran Politik Kyai di Pedesaan)

Oleh :

Luluk Maktumah¹
Lulu_Adjie@yahoo.com

Abstract

The study of the role of clerics in society has many conducted by researchers. Both the typology and variations forms of political involvement in rural communities. Studies on these clerics interesting to talk about at least since two reasons: (1) The difference of understanding of clerics still occur among researchers; (2) The modernization process has seen lower their roles and functions as a character kyais religion in society. In any event, the involvement of clerics is needed in the community because sociologically kyais is part of the religious life. The study discusses typology clerics and other forms of involvement in politics in rural communities. Kyai can be categorized not just as spiritual religious scholars, clerics advokatif, adaptive and political clerics political clerics critical partners, as expressed by the Imam Suprayogo, but also clerics and religious scholars nasab fate, seen from In terms of his descendants and spiritual religious scholars, clerics movements, political clerics accommodating pragmatic and ideological clerics accommodative political views in terms of activity and political affiliation in the community.

Keywords: *Problem Based Learning, Cube and Cuboid*

PENDAHULUAN

Kyai sebagai sebutan kehormatan bagi elit agama khususnya di Jawa, masih sering diperdebatkan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan keterlibatannya dalam politik. Sebagaimana kalangan berpendapat bahwa kyai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karenanya lebih tepat jika ia menghindari diri dari keterlibatannya dala politik. Ada pula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan kyai menghindar dari keterlibatan dalam politik praktis, sebab berpolitik secara sosiologis merupakan bagian dari kehidupan beragama.

Perdebatan cukup menarik juga dalam kaitan dengan posisi kyai dalam perubahan sosial. Geertz misalnya, menyatakan kyai dan ulama' tidak memberikan andil apa-apa dalam politik.²Noer juga memilikipandangan yang samadengan Geertz, Ia mengatakan bahwa gerakan politik lebih banyak diserahkan pada kalangan adat dan priyai,bahkan ia menilai, kelompok elit agama ini sangat pasif dalam menentang penjajah. Mereka lebih suka mengurung diri di pesantren, dengan mengembangkan tarekat.³

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

²Clifford Geertz, *"Abangan, Santri dan Priyai dalam Masyarakat Jawa (Jakarta; Pustaka Jaya, 1983), 220-249*

³Delliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia th 1900-19442, (Jakarta; LP3ES, 1989), 137*

Pandangan yang sangat bertolak belakang dengan pendapat di atas, masing-masing dikemukakan oleh Horikoshi dan Dhafier. Keduanya berpendapat bahwa kyai berperan banyak dalam politik. Menurut Dhofier, Noer tidak mengerti tentang arti “alim” dan tradisional.⁴ Sejarah telah mencatat bahwa, menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI, KH Wahid Hasyim sebagai refresentasi kyai pesantren telah menunjukkan peran politiknya sebagai tokoh besar yang aktif membidani lahirnya NKRI dan salah seorang yang turut mempersembahkan “Mukaddimah” atau Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD’45) kepada bangsa Indonesia⁵. Demikian juga menurut Horikoshi, mengatakan bahwa elit agama yang disebut kyai sesungguhnya cukup responsif terhadap perubahan. Ia mengatakan bahwa kyai bukan *cultural broker*,⁶ sebagaimana disebutkan oleh Geertz, melainkan lebih tepat sebagai *volunteer* politik pedesaan. Dirdjosunotojuga memiliki pandangan yang tegas tentang hal ini, menurutnya sejak semula kyai berada pada posisi mendua; disatu sisi ia seorang tokoh agama, disisi yang lain tokoh politik. Peran ini telah dimainkannya sejak dulu hingga sekarang.⁷

Kontroversi tentang kyai juga masih terjadi, bahkan akan terus terjadi, tidak saja diantara hasil penelitian serupa pada tempat yang berlainan, melainkan juga dengan fenomena yang berkembang dan bisa dilihat sampai sekarang ini. Di tengah-tengah silang pendapat para peneliti, ternyata aktivitas kyai yang bernuansa politik masih tetap berjalan, bahkan di era reformasi ini “syahwat” pilitik kyai semakin membirahi dibandingkan era sebelumnya. Peran Kyai (tokoh agama) dalam sebuah partai seringkali menentukan pemilihan konstituen dalam pemilu. Hal ini karena tokoh tersebut menjadi panutan banyak orang dan dipuja karena ide serta kharisma yang dimilikinya. Maka tidak dapat dipungkiri apabila banyak partai politik yang berebutan menawarkan seorang tokoh dalam kepengurusan partai. Bahkan diangkat dalam kepengurusan partai dan diminta untuk merestui partai tersebut dengan harapan memperoleh suara dari para konstituen.⁸ Peran kyai (tokoh agama) dalam politik di masyarakat, adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dikajisecara sossilogis maupunideologis,oleh karenanya thema yang dijukan dalam kajian ini adalah **“Peran Politik Kyai di Masyarakat : Studi Atas Bentuk dan Variasi Peran Politik Kyai di Pedesaan.**

Berangkat dari pemaparan tersebut di atas, maka terdapat dua permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini,yaitu : (1) Bagaimana tipologi kyai dilihat dari peran dan latar belakangnya

⁴Menurut Dhofier, Pernyataan-pernyataan Noer terlalu berlebihan dan sangat sabyektif yang dilancarkan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup, tidak jelas siapa yang dimaksud dengan islam kolot. Apakah orang ababang atau para kyai di pesantren-pesantren. Andaikataupun yang dimaksudkan adalah para kyai pemimpin pesantren, berarti ia kurang memahai tentang kewajiban dan tugas sebenarnya seorang “Alim”. Baca lebih jelas dalam Zamakhsary Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai masa Depan Indonesia*, (Jakarta, LP3ES, 2011, Edisi Revisi), 13

⁵Ibid, 147

⁶Horikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*” (Jakarta, P3M, 1987), 245-246

⁷Pradjarta, Disdjosanjoto, *Memelihara Umat, Kyai Diantara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Daerah Muria*, (Amsterdam : VU University Press, 1994), 197.

⁸Tri Sundari, “Peran Politik Kyai di Pedesaan: Studi Kasus di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, (on line), dalam : <http://lib.unnes.ac.id/626/>, diakses tanggal 23 Mei 2013

di masyarakat? (2). Bagaimana bentuk afiliasi peran politik kyai dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat?

Kajian ini secara umum ingin memahami bentuk-bentuk dan variasi peran politik kyai di masyarakat secara ideologis maupun sosiologis, sampai pada lapis paling bawah. Sedangkan secara lebih rinci adalah dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut : (1). Mendiskripsikan serta memberikan penjelasan tepologi kyai dan yang melatarbelakanginya dalam kehidupan masyarakat, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang tepat; (2). Ingin mengetahui dan mengeksplorasi afiliasi dan bentuk-bentuk peran politik kyai dalam mempengaruhi preferensi politik di masyarakat.

Menyesuaikan dengan masalah yang diajukan, penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, melihat bagaimana individu menjalin dan memberikan makna terhadap hubungan sosial, dimana individu menjadi bagian di dalamnya,⁹ sehingga tidak saja menelusuri hubungan sebab akibat sebagaimana dalam paradigma fakta sosial,¹⁰ melainkan juga berusaha mencari pemahaman yang mendalam. Weber menyebutnya dengan istilah *verstehen*.¹¹ Penggalan data dilakukan lewat "*observasi partisipatori*" dan "*wawancara mendalam*". Metode seperti ini biasa juga disebut dengan penelitian kualitatif, atau kualitatif naturalistik,¹² yaitu jenis penelitian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, melainkan juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam dibalik fenomena yang berhasil direkam. Sedangkan pendekatan yang dipilih adalah fenomenologi, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan-pertimbangan etik disetiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.

Atas dasar pendekatan itu, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, melakukan observasi untuk memperhatikan kegiatan kyai, termasuk memperhatikan ungkapan-ungkapan yang sering muncul tentang agama, masa depan masyarakat yang diidealkan maupun dirasakan memprihatinkan. *Kedua*, memahami makna dan pandangan kyai yang bersangkutan. *Ketiga*, membanding-bandingkan antara temuan yang satu dengan temuan berikutnya, dan *Keempat*, menyusun kategori-kategori,

⁹Zainuddin Maliki, "*Rekonstruksi Teori Sosial Modern*" (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2012), 262

¹⁰George Ritzer, "*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Terj)*, Alimandan" (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 38

¹¹*Verstehen*, dimaksudkan oleh Weber sebagai metode untuk mengidentifikasi "motif" yang nyata atau kompleks motives yang diproduksi dalam pengalaman individu, sebuah motive yang dapat digunakan untuk memberi atribut tindakan dalam membahas derajat ketepatan yang dalam hal ini bergantung pada sumber materialnya. Dengan kata lain karena kelemahannya untuk memberikan penafsiran yang bermakna.... tindakan individu pada prinsipnya secara intrinsik kurang 'irrational' dibanding dengan masing-masing peristiwa alam. Zainuddin Maliki, "*Rekonstruksi Teori Sosial Modern*", 262

¹²Istilah "kualitatif naturalistik", menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya. Dengan sifatnya ini maka dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan, tidak seperti penelitian kuantitatif yang dapat mewakilkan orang lain untuk menyebarkan atau melakukan wawancara terstruktur. Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta, PT Renika Cipta, 2006) 12

mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dan mengembangkan hipotesis-hipotesis dan teori berdasarkan data yang diperoleh. Proses itu tentu tidak berjalan linier, melainkan berjalan berulang-ulang sampai ditemukan pemahaman yang terasa mantap.

PEMBAHASAN

Peran serta kyai dalam politik di masyarakat dalam sudut pandang sosiologi dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial (social action), terutama yang berkaitan dengan kehidupan politik.¹³ Oleh karena itu, tindakan sosial disini memiliki arti luas, menyangkut semua kelompok sosial, perilaku sosial, dan akses kepentingan baik secara kolektif maupun individual. Perilaku politik kyai baik secara individu maupun kelompok (seperti jam'iyah NU), mempunyai arti subyektif memiliki tujuan tertentu, bukan sebagai perilaku yang muncul secara kebetulan. Sehingga tindakan-tindakan kyai dalam berbagai perilaku sosial dan politik, dapat digolongkan pada tindakan rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional dan rasionalitas efektif.¹⁴ Begitu pula peran politik kyai yang terakomodasi dalam tindakan sosial, tidak bisa lepas dari tindakan politik dan proses politik yang terjadi dalam komunitas kyai pesantren.¹⁵

Weber dalam "*Teori Tindakan Sosial*" ini menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya.¹⁶ Ia melihat bagaimana individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial dimana individu menjadi bagian di dalamnya.¹⁷ Weber mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan "*verstehen*" agar dengan cara itu dapat menghasilkan sebuah penjelasan mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya.¹⁸

Perlu dicatat bahwa sikap dan tindakan individu bisa dinyatakan sebagai sikap dan tindakan sosial, apabila memang diarahkan kepada perilaku orang lain. Misalnya perilaku keberagamaan bukan tindakan sosial kalau ia hanya mengambil bentuk kontemplasi atau do'a sendirian. Aktivitas ekonomi menjadi tindakan sosial apabila dilakukan atas dasar sikap orang lain. Dengan demikian tindakan sosial bukan karena semata banyak orang melakukan tindakan yang sama, melainkan sebuah tindakan yang diarahkan kepada orang lain sehingga kemudian menimbulkan sikap balik, dan itulah "*tindakan sosial*".¹⁹ Dari situlah akan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan perkembangan rasionalitas manusia.²⁰ Menurut Weber bentuk rasionalitas manusia meliputi *mean* (alat) yang menjadi sasaran utama, serta *ends* (tujuan) yang meliputi aspek kultural, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya bahwa orang bisa

¹³Khoiro Ummatin, "*Prilaku Politik Kyai*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 30-31

¹⁴Ibid, 32, baca juga Zainuddin Maliki, "*Rekonstruksi Teori Sosial Modern*", 265

¹⁵Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*", (Jakarta: Gramedia, 1992), 15

¹⁶Zainuddin Maliki, "*Sosiologi Politik ; Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*" (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2010), 13

¹⁷Ibid, 14

¹⁸Ibid, 14

¹⁹Zainuddin Maliki, "*Rekonstruksi Teori Sosial Modern*", 264

²⁰Nanang martono, "*Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*", (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada; 2012), 47

mampu hidup dengan pola pikir yang rasional yang pada seperangkat alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung kehidupannya. Orang yang rasional akan memilih alat mana yang paling benar untuk mencapai tujuan.²¹

Kyai dalam berinteraksi dengan masyarakat, memainkan perannya secara individu (sebagai aktor), sangat berkaitan bahkan diarahkan kepada orang lain. Kyai selain sebagai tokoh agama juga sebagai tokoh panutan masyarakat, sudah tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti keterlibatan kyai dalam politik, setidaknya ada tiga alasan mengapa kyai selalu terlibat dalam aktivitas politik. *Pertama*; bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup tak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua aspek kehidupan, baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial dan juga menyangkut persoalan politik. *Kedua*; dengan posisinya kyai sebagai aktor (pemuka agama), ia memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan kyai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan dan ekonomi. *Ketiga*; dari sisi sejarahnya, kyai memiliki peran yang cukup besar dalam politik, yang hal itu dapat dilihat dalam pergolakan melawan penjajah hingga beberapa masa kemudian, setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan.²² Disinilah terjadi perilaku tindakan sosial, dimana kyai memerankan dirinya sebagai aktor yang diarahkan kepada masyarakat sehingga menimbulkan balikan dari masyarakat itu sendiri.

Secara sosiologis, kyai yang sekilas tampak homogen itu, jika dilihat secara seksama ternyata sangat variatif. Varian tersebut diakibatkan oleh banyak faktor. Misalnya, bersumber dari perbedaan mereka dalam mempersepsikan dan memahami ajaran agama itu sendiri, lingkungan dimana masing-masing kyai itu hidup dan dibesarkan, kondisi ekonomi, dan juga faktor sosial politik. Akibatnya, muncullah tipe kyai yang berbeda-beda.²³ Perbedaan tipe kyai juga tentu akan melahirkan bentuk keterlibatan politik yang berbeda pula, sebagaimana Abdurrahman Mas'ud telah mengelompokkan kyai kedalam lima tipologi: (1). *Kyai Encyclopedi dan Multidisipliner*, yaitu tipologi kyai yang dalam kesehariannya mengkonsentrasikan diri terhadap dunia ilmu, mengajar dan menulis, sehingga menghasilkan banyak tulisan yang menyebar ke masyarakat luas. (2). *Kyai yang ahli dalam salah satu bidang disiplin ilmu*, sehingga muncul istilah kyai Fiqih, Kyai Tasawwuf, Kyai Nahwu dan sebagainya. (3). *Kyai kharismatik*, yaitu kyai yang memiliki kharisma dari ilmu pengetahuan agamanya (khususnya dalam bidang sufisme) seperti KHM Kholil Bangkalan. (4). *Kyai Da'i keliling*; yaitu perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya, sebagai bentuk interaksinya dengan public. (5). *Kyai Pergerakan*; karena skill dan

²¹Ibid, 47

²²Zamakhsary Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 13-14

²³Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang, UIN Malang Press, 2007), 109

kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya.²⁴

Demikian pula Suprayogo telah mengkategorikan kyai menjadi empat kategori; (1). *Kyai Spiritual*; kyai yang mempunyai karakteristik tertutup, statis, konservatif, agama sebagai penenang jiwa, orientasi keakhiratan, dan kurang peduli terhadap politik. (2). *Kyai Advokatif*; karakteristiknya terbuka, dinamis, inovatif, agama difungsikan sebagai dinamisator dan integrator, orientasi dunia akhirat, dan politik sebagai instrumen. (3). *Kyai Politik Adaptif*; kyai yang mempunyai karakteristik terbuka, dinamis, inovatif, agama difungsikan sebagai dinamisator, dekat dengan penguasa, orientasi dunia akhirat, politik sebagai instrumen. (4). *Kyai Politik Mitra Kritis*; Kyai ini mempunyai karakteristik tertutup, statis, konservatif, agama sebagai penenang jiwa, orientasi keakhirat, politik sebagai instrumen dan lebih dekat kepada umat.²⁵ Muncul dan berkembangnya berbagai aliran keagamaan di berbagai tempat adalah bukti bahwa selalu adanya perbedaan pemahaman, persepsi dan sudut pandang yang digunakan untuk memahami ajaran agama sehingga melahirkan pengertian yang berbeda. Perbedaan kyai tersebut dapat pula karena posisi kyai di lingkungan masyarakat,²⁶ sehingga memiliki orientasi kegiatan dan bentuk-bentuk kegiatan politik yang berbeda pula. Kyai yang lebih memperhatikan aspek politik akan berbeda dengan kyai yang hanya menitik beratkan kegiatannya pada kehidupan pesantren yang sehari-harinya mengurus para santri dan melakukan pendekatan pada tuhan dengan melakukan banyak ibadah. Demikian pula para kyai yang berpendidikan ganda – lulusan pondok pesantren dan sekaligus sekolah umum-- , berbeda dengan kyai yang berpendidikan pondok pesantren saja.²⁷

Kategori/tipologi kyai yang dijabarkan oleh para peneliti di atas, baik Imam Suprayogo, Abdurrahman Mas'ud dan Muhammad Afsar, menjadi rujukan utama sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dengan didasarkan pada alur berfikir teori tindakan sosial yang digagas oleh Mac Weber, sehingga kemudian lahir temuan-temuan baru, baik sebagai penguat maupun kritik terhadap temuan sebelumnya.

A. Kategori, Tipologi dan Latar Belakang Kyai di Masyarakat

Data lapangan menunjukkan bahwa di masyarakat Situbondo, terdapat perbedaan antara kyai yang satu dengan kyai yang lainnya atas dasar berbagai sudut pandang, yaitu: **Pertama**, *dipandang dari segi keturunan*; lahirilah istilah "**Kyai Nasab**" dan "**Kyai Nasib**". Kyai Nasab, adalah kyai yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan mendapatkan gelar kehormatan sebagai kyai karena yang bersangkutan keturunan kyai, atau keluarga kyai. Masyarakat lebih memperhatikan latar belakang keluarganya daripada kapasitas keilmuannya untuk menyandang gelar kehormatan sebagai kyai. Legitimasi yang demikian ini Weber mengistilahkannya sebagai legitimasi tradisional; yaitu legitimasi yang

²⁴ Abdurrahman Mas'ud "Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi" (Yogyakarta: LKIS, 2004) 236-237

²⁵ Imam Suprayogo, "Kyai dan Politik: 121

²⁶ Muhammad, Afsar, *Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kyai*, (Prisma, Vol : 5, 1996), 29-41

²⁷ Ibid, 45

bersumber dari tradisi, adat, turun temurun atau kebiasaan lama. Legitimasi tradisional ini umumnya diterapkan oleh kepala suku, kepala keluarga dan kaum aristokrat feodal.²⁸ Sedangkan "**Kyai Nasib**", adalah seseorang mendapatkan legitimasi sebagai kyai, lebih disebabkan karena faktor "**keberuntungan**". Dalam kasus ini ada dua hal yang bisa dijadikan alasan masyarakat untuk memanggilnya sebagai kyai walaupun bukan keturunan kyai, yaitu (1), kerena yang bersangkutan menjadi menantu kyai, (2), alumni pondok pesantren meskipun dengan bekal ilmu agama seadanya lalu kemudian dipercaya oleh masyarakat untuk mendirikan pondok pesantren, maka masyarakat memanggilnya "**kyai**". Panggilan tersebut menurut Dhofier merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang menjadi pimpinan pondok pesantren dan memiliki keahlian ilmu agama Islam,²⁹ karena kyai memiliki peran penting dalam kehidupan beragama di masyarakat. Dari realitas sosial inilah diakui atau tidak, sosok kyai memiliki power serta otoritas yang cukup tinggi di masyarakat.³⁰

Kedua, atas dasar keaktifannya dalam tarikat, pembagian ini memunculkan kyai tarikat (mursyid) dan bukan kyai tarikat. Erat kaitannya dengan klasifikasi model kedua ini, kerap warga setempat menyebutnya kyai "alim" dan kyai "sufi". Pengertian kyai alim adalah kyai yang memiliki keahlian ilmu agama islam yang ditunjukkan lewat kemampuannya membaca kitab klasik atau kitab kuning. Sedangkan kyai sufi adalah kyai yang dikenal memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, yang dengan kemampuannya itu ia dianggap memiliki karomah dari Allah.

Ketiga, dilihat dari orientasi kegiatan, yang menonjol secara berbeda, yaitu, (1), *kyai spiritual*,³¹ ialah pengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri kepada Allah lewat amalan ibadah tertentu. (2), *kyai pergerakan*, yaitu pengasuh pondok pesantren yang selain aktif mengajar para santri dan jamaahnya, juga aktif serta gigih dalam organisasi sosial kemasyarakatan, serta peduli terhadap persoalan-

²⁸Zainuddin Maliki, "*Rekonstruksi Teori Sosial Modern*", 283

²⁹Menurut Dhofier, Gelar kyai dibentuk dan ditentukan oleh masyarakat, bukan gelar yang diciptakan sendiri oleh kyai tersebut. Gelar seperti ini merupakan gelar sosial yang menentukan prestis tidaknya seseorang dalam masyarakat. Gelar kyai juga diberikan kepada seseorang yang dianggap tokoh oleh masyarakat di luar urusan agama, atau diberikan kepada seseorang di luar kapasitasnya sebagai ahli ilmu agama. Dalam tradisi Jawa gelar yang diberikan dikenal dengan sebutan Kiai, Yai atau Ki. Masih menurut Dhofier, gelar kyai juga diberikan kepada seseorang yang ahli di bidang ilmu agama Islam, utamanya kitab kuning meskipun yang bersangkutan tidak memiliki pesantren. (on Line) Abdul Chalik, "*Kyai dan Kekuasaan Sosial dalam Masyarakat Madura*" dalam <http://lontarmadura.com/kiai-dan-kekuasaan-sosial-dalam-masyarakat-madura/>, diakses Tanggal 25 Mei 2013.

³⁰Mien Ahmad Rifa'i, "*Madusia Madura; Pembawaan, Prilaku dan Etos Kerja*", (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 108.

³¹Spiritualitas adalah kesadaran diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan dan nasib. Agama adalah kebenaran mutlak dari kehidupan yang memiliki manifestasi fisik diatas dunia. Agama merupakan prilaku tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh institusi tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh institusi tertentu yang dianut oleh anggota-anggotanya. Agama memiliki kesaksian iman, komunitas dan kode etik, dengan kata lain spiritual memberikan jawaban siapa dan apa seseorang itu (keberadaan dan kesadaran), sedangkan agama memberikan jawaban apakah seseorang harus mengerjakan seseorang (prilaku atau tindakan). Seseorang bisa saja mengikut agama tertentu, namun memiliki spiritualitas. Orang-orang dapat menganut agama yang sama, namun belum tentu mereka memiliki jalan atau tingkat spiritualitas yang sama (on line), dalam <http://zohrysmart.blogspot.com/2012/10/makalah-spiritual.html>, diakses tanggal 25 Mei 2014

persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa berusaha mencari jalan keluarnya. (3), *Kyai politik*, yaitu pengasuh pesantren yang senantiasa peduli pada organisasi politik juga pada kekuasaan. Kategori kyai politik ini dapat dibedakan menjadi; kyai politik akomodatif pragmatis dan akomodatif ideologis, serta kyai mitra kritis. Imam Suprayogo membedakannya menjadi kyai politik adaptif dan mitra kritis.³²

Keempat; Menyangkut tentang latar belakang; variasi kyai sedikitnya terdapat tiga faktor yang cukup dominan membentuk tipologi kyai, yaitu, social learning, pemahaman agama, dan adaptasi terhadap lingkungan. Setiap orang pasti mengalami social learning yang berbeda: (1). *Latar belakang pendidikan;* Kyai yang menempuh pendidikan lebih bervariasi memiliki wawasan yang berbeda dengan kyai yang hanya terbatas pada pendidikan diniyah di pesantren. Semakin bervariasi lembaga pendidikan yang diikuti, wawasan keagamaan mereka tampak semakin luas. (2). *Pemahaman keagamaan,* sekalipun agama bersumber dari kitab yang sama, tetapi ternyata ajaran itu dapat dimengerti, dipersepsi atau dimaknai secara berbeda. Akibatnya lahirlah penilaian masyarakat yang berbeda terhadap kyai yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut melahirkan sebutan kyai liberal dan kyai konservatif, dan (3). *Cara beradaptasi terhadap lingkungan.* Tampak dengan jelas di masyarakat terdapat kyai yang cepat melakukan adaptasi, dan sebaliknya, terdapat diantara mereka yang lambat melakukan adaptasi.

Jika diamati secara seksama, kyai yang berlatar belakang pendidikan heterogen –lulusan pondok pesantren dan juga sekolah umum–, cara memahami agama tampak terbuka, memiliki independensi yang tinggi dan social learning yang variatif maka cenderung disebut sebagai “*kyai liberal*”, dalam arti yang positif. Sedangkan kyai yang hanya berpendidikan “pondok pesantren” (diniyah), social learning terbatas, pemahaman agama cenderung tertutup, maka cenderung disebut “*kyai konservatif*”. Tetapi jika ia memiliki social learning agak luas, dan memiliki independensi ekonomi, maka cenderung menjadi “*kyai mitra kritis*”.

B. Bentuk-bentuk Keterlibatan Politik Kyai di Masyarakat

Bentuk keterlibatan kyai dalam politik di masyarakat Situbondo sedikitnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; **Pertama, Kyai politik.** Kyai politik ini untuk kasus Situbondo dalam menentukan afiliasi politiknya terdapat dua golongan: (a); **Kyai Akomodatif Pragmatis**, ia bersifat netral, tidak menjadi pengurus partai, namun ada keberpihakan pada salah satu kekuatan partai. Dalam rekrutmen elit politik baik eksekutif maupun legislatif, keterlibatannya berbentuk “*partisipatif kalkulatif*”. Artinya, mereka mau membantu kandidat tertentu dengan catatan yang bersangkutan bersedia memberi imbalan yang diperlukan untuk kepentingan “dakwah”. Seiring dengan itu kyai akomodatif pragmatis ini bisa kompromi dengan siapa saja –baik eksekutif maupun legislatif–, dalam bingkai kepentingan agar memperoleh imbalan bantuan yang diperlukan bagi lembaga pendidikan yang dikembangkannya. Upaya serba kalkulatif itu dapat dibuktikan dari

³²Imam Suprayogo, “*Kyai dan Politik*”: 123

pengakuan kyai yang bersangkutan, atau fasilitas yang berhasil direngkuhnya dapat dilihat di tempat yang bersangkutan. Karena motifnya kalkulatif, konsekwensinya tatkala kyai yang bersangkutan tidak lagi menerima bantuan, maka dukungannya terhadap jagoannya itu perlahan-lahan dan pasti turun. Secara ideologis peran politik kyai ini berbentuk *"akomodatif partisipatif kalkulatif pragmatis"*. Politik hanya dibuat ajang untuk meraih kepentingan dan meraup keuntungan sesaat,³³ peran politik seperti ini mendorong lahirnya politik kutu loncat, --meminjam istilah Indra Tranggono-- , ibarat tukang jual obat, kerjanya hanya retorik, tidak substansial. Mutu dan kemanfaatan diri tidak terlalu penting. Yang diutamakan ialah provokasi publik agar percaya atas politik kutu loncatnya. Karena retorik, jualannya dibungkus dengan istilah integritas, komitmen, dan kapabilitas.³⁴ bahkan tidak jarang sampai pada politisasi agama demi kepentingannya. (b); **Kyai Akomodatif Ideologis**, ia dalam menentukan afiliasi politiknya mengakomodir atau memiliki keberpihakan pada salah satu kekuatan partai politik yang seideologi, bahkan bersedia menjadi pengurus salah satu organisasi partai politik, demi memperjuangkan sebuah ideologi. Ia berasumsi bahwa kyai harus masuk dan ikut berpartisipasi dalam politik praktis untuk segera memperbaiki kebobrokan yang terjadi di dalamnya. Terlebih dengan kian merosotnya citra para elite politik di mata masyarakat, hal ini bertolak dari fakta yang terjadi selama ini, para wakil rakyat kian jauh dari implementasi amar ma'ruf nahlil mungkar.³⁵

Kedua; Kyai mitra kritis, keterlibatannya dalam politik dapat dibedakan menjadi dua bentuk : (1). Partisipasi aktif-kritis; artinya, ia secara nyata terlibat dalam politik berupa ikut ambil bagian menjadi penggerak kegiatan politik, dan tidak selalu seirama dengan kemauan penguasa. (2). Partisipasi pasif- normatif, artinya, ikut berpartisipasi sekalipun pasif, misalnya dalam pemilu sebagai warga negara ia juga aktif menyalurkan aspirasi politiknya melalui bilik suara, sesuai dengan pilihannya sendiri. Akan tetapi jika terjadi penyimpangan terhadap norma politik ia akan bersikap kritis.

Peran politik kyai mitra kritis ini sejalan dengan hasil penelitian Imam Suprayogo, yang membagi peran politik kyai menjadi politik adaptif dan mitra kritis³⁶. Namun demikian, karena penelitian Suprayogo dilaksanakan pada masa Orde Baru yang "otoriter", di mana kran politik sangat terbatas, maka kyai mitra kritis tentu sangat banyak dijumpai dibandingkan dengan kyai politik, karena situasi politik yang mendukung saat itu. Beda halnya di era reformasi sekarang ini, kendatipun di masyarakat Situbondo masih dijumpai kyai yang memilih peran politik mitra kritis, namun sangat sedikit jumlahnya. Era sistem multi partai telah mendorong para kyai untuk turut ambil bagian

³³Jarot Doso Purwanto, *"Ideologi dan Pragmatisme Politik"* (online) dalam <http://politik.kompasiana.com/2010/05/16/ideologi-dan-pragmatisme-politik-141943.html>, diakses tanggal 25 Mei 2014

³⁴.Muhammadun, *"Politik Kutu Loncat dan Matinya Ideologi Politik"* (on line) dalam <http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/politik-kutu-loncat-dan-matinya.html>, diakses tanggal 25 Mei 2014

³⁵Kholisuddin, *"Ketika Kyai Terjun Berpolitik"*, (Jawa Pos; 15 Nopember 2008), 32

³⁶Imam Suprayogo, *"Kyai dan Politik: 123-124"*

dalam percaturan politik partisan, juga tidak jarang dijumpai yang sampai pada perilaku politik ***“akomodatif kalkulatif pragmatis”***.

C. Penutup

Para kyai di masyarakat pedesaan sebagaimana diduga sebelumnya, ternyata begitu bervariasi. Ada sebagian kyai yang menitikberatkan pada pengembangan spiritual, sedangkan yang lainnya lebih pada aspek politik, serta terdapat pula kyai yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Hal itu muncul, karena di latarbelakangi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal dari kyai yang bersangkutan. Misalnya kyai yang berlatar belakang pendidikan pesantren dan umum, ternyata lebih terbuka terhadap perubahan dan juga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif baik dalam kognisi keagamaan maupun pemahaman terhadap masyarakatnya.

Masing-masing tipe kyai memiliki karakteristik yang berbeda. Kyai Pergerakan lebih menonjol kemampuannya menerjemahkan doktrin agama untuk menggerakkan dan sekaligus mengintegrasikan masyarakat seperti di bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan kyai politik berani berbeda arus orientasi politiknya dengan siapa saja yang berbeda afiliasi politiknya, atau malah justru berkualitas dengannya. Sementara kyai spiritual, jika dilihat dari kaca mata pembangunan material, perannya kurang relevan dalam kehidupan yang semakin modern seperti sekarang ini. Namun demikian, dalam bidang-bidang tertentu keberadaan kyai spiritual masih fungsional, termasuk bagi masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta, PT Renika Cipta, 2006)

Asfar, Muhammad, *Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kyai*, (Prisma, Vol : 5, 1996),

Chalik, Abdul *"Kyai dan Kekuasaan Sosial dalam Masyarakat Madura"* dalam <http://lontarmadura.com/kiai-dan-kekuasaan-sosial-dalam-masyarakat-madura/>
Dhofier, Zamakhsary *"Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai masa Depan Indonesia"*, (Jakarta, LP3ES, 2011, Edisi Revisi),

Disdjosanjoto, Pradjarta, *"Memelihara Umat, Kyai Diantara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Daerah Muria"*, (Amsterdam : VU University Press, 1994),

Geertz, Clifford *"Abangan, Santri dan Priyai dalam Masyarakat Jawa"* (Jakarta; Pustaka Jaya, 1983), Noer, Delliar *"Gerakan Modern Islam di Indonesia th 1900-19442"*, (Jakarta; LP3ES, 1989),

Hiroko, Horikoshi, *"Kyai dan Perubahan Sosial"* (Jakarta, P3M, 1987),

Kholisuddin, *"Ketika kyai Terjun Berpolitik"*, (Jawa Pos; 15 Nopember 2008),

Maliki, Zainuddin *"Rekonstruksi Teori Sosial Modern"* (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2012),

----- *"Sosiologi Politik ; Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik"* (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2010),

Martono, Nanang *"Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial"*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada; 2012),

Muhammadun, *"Politik Kutu Loncat dan Matinya Ideologi Politik"* (on line) dalam <http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/politik-kutu-loncat-dan-matinya.html>, diakses tanggal 25 Mei 2014

Mas'ud, Abdurrahman *"Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi"* (Yogyakarta: LKIS, 2004)

Ritzer, George *"Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Terj), Alimandan"* (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011),

Purwanto, Jarot Doso *"Ideologi dan Pragmatisme Politik"* (on line) dalam <http://politik.kompasiana.com/2010/05/16/ideologi-dan-pragmatisme-politik-141943.html>

Ummatin, Khoiro "*Prilaku Politik Kyai*", (Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2002), 30-31

Surbekti, Ramlan "*Memahami Ilmu Politik*", (Jakarta: Gramedia, 1992)
Rifa'i, Mien Ahmad "*Madusia Madura; Pembawaan, Prilaku dan Etos Kerja*", (Yogyakarta: Pilar Media, 2007),

Suprayogo, Imam "*Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*", (Malang, UIN Malang Press, 2007),

Sundari, Tri "*Peran Politik Kyai di Pedesaan: Studi Kasus di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas*", (on line), dalam : <http://lib.unnes.ac.id/626/>,

Talcot Parson, A. *Revised Analytical Aproach to The Teory of Social Stratification in The Class, Status and Power*, (New York : The Free Pres of Glencoa, 1996)
<http://zohrysmart.blogspot.com/2012/10/makalah-spiritual.html>.